

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu yang menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. UMKM juga berkontribusi secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menjadi sumber utama penciptaan lapangan. Berwirausaha dianggap menjadi suatu cara yang ampuh untuk mendorong terciptanya lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Maka pemerintah mendorong peningkatan minat usaha untuk meningkatkan rasio kewirausahaan dengan mengembangkan berbagai program yang berdampak signifikan pada perilaku usaha UMKM. Untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan dan keberhasilan usaha di sektor UMKM. Penelitian ini akan mengkaji bahwa kebijakan pajak memiliki efek positif atau negatif terhadap produktivitas dan pertumbuhan UMKM. Peningkatan akses ke kredit mikro atau program pembiayaan pemerintah mempengaruhi perilaku usaha UMKM seperti inovasi produk atau jasa dan faktor seperti pendidikan, lingkungan sosial, kondisi ekonomi yang mempengaruhi perilaku usaha UMKM.

Perilaku berwirausaha merupakan cakupan dari tindakan, sikap, dan cara berpikir yang dimiliki seseorang dalam menjalankan usaha ataupun bisnis. Perilaku yang mencakup karakteristik ataupun keterampilan dalam mendukung kesuksesan seseorang di dunia usaha. Perilaku berwirausaha ini juga merupakan aspek integral dalam

perkembangan ekonomi dan sosial. Dengan memahami perilaku, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi wirausaha dan UMKM yang memperkuat ekonomi masyarakat. Namun, meskipun perilaku berwirausaha bersifat positif, ada beberapa sejumlah tantangan dan masalah perilaku yang bisa menghambat keberhasilan usaha.

Banyak wirausaha yang cenderung terlalu enggan mengambil resiko. Hal ini dapat menghambat inovasi pada pertumbuhan bisnis, apalagi ketika seorang wirausahaan yang terlalu fokus pada keamanan dan tidak berani untuk mencoba hal baru. Dalam membangun usaha membutuhkan disiplin yang tinggi dan konsistensi dalam mencapai target. Namun jika seorang wirausahaan tidak disiplin maka akan cenderung tidak konsisten mencapai tujuan bisnis yang akan mengakibatkan kegagalan. Pelaku UMKM yang tidak peka terhadap tren masa kini yang membuat UMKM tersebut lambat untuk maju, terutama dalam menilai pasar yang terus berubah-ubah. Keterbatasan keterampilan seperti pemasaran digital juga bisa mengurangi pelanggan. Dalam UMKM, pemilik usaha dalam membuat keputusan biasanya berdasarkan pengalaman pribadi atau bahkan terlibat di setiap aspek bisnis. Hal ini berpotensi terhadap peluang baru dengan memaksimalkan efisiensi guna meningkatkan *profit*.

Perilaku usaha ini juga dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan, sumber daya manusianya itu sendiri. Keterbatasan majerial ini menyebabkan masalah dalam pengelolaan keuangan, modal, arus kas, serta pengaturan tim yang akan berdampak pada kinerja bisnis. Banyak wirausahaan yang kesulitan dalam mendelegasikan tugas

karena merasa melakukan segalanya sendiri, hal ini membatasi kapasitas bisnis untuk berkembang. Dalam beberapa kasus, wirausaha lebih fokus pada keuntungan atau operasional bisnis tanpa memahami terkait yang menjadi kebutuhan pelanggan. Hal ini akan menyebabkan bisnis akan kehilangan pelanggan, reputasi, dan akan kesulitan dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Dalam beberapa aspek seperti kebijakan pajak, akses finansial, serta minat berwirausaha juga yang berpengaruh pada keberhasilan usaha dan menjadi salah satu faktor yang menjadi penghalang bagi seseorang untuk membuka usaha atau mengembangkan usahanya karena dianggap menjadi beban.

Kebijakan pajak memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara termasuk dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor usaha. Kebijakan pajak yang baik dapat mendorong investasi dan mendukung terciptanya lapangan kerja serta meningkatkan daya saing. Akan tetapi, kebijakan pajak yang kurang tepat sasaran dan tidak sesuai kondisi akan menghambat pertumbuhan sektor usaha. Pajak adalah salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah seperti belanja negara, pajak juga menjadi instrumen dalam mengendalikan perekonomian yang berpengaruh pada konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengumpulkan pajak dari masyarakat untuk mendanai program pemerintah termasuk dukungan terhadap UMKM. UMKM merupakan bagian penting dalam perekonomian, UMKM memberikan kontribusi secara langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Kebijakan pajak yang diterapkan pada UMKM seperti, PPN

(pajak pertambahan nilai), PPh Final (pajak penghasilan final) dan pajak retribusi daerah yang berpengaruh pada kemampuan pelaku usaha UMKM untuk berkembang dan bersaing.

UMKM sering merasa terbebani oleh tarif pajak dan kompleksitas pajak yang rumit, ini yang menjadi masalah utama dalam memulai usaha. Kebijakan pajak yang memerlukan banyak dokumen atau prosedur administrasi yang rumit. Banyak pelaku UMKM yang kurang memahami peraturan pajak yang berlaku. Kecilnya presentasi literasi pajak di kalangan UMKM yang menyebabkan ketidakpatuhan atau kesalahan dalam pengelolaan pajak. Sebagian pelaku UMKM merasa bahwa kebijakan pajak tidak memberikan insentif yang cukup bagi pelaku usaha untuk berkembang. Di Kota Batam yang memiliki status sebagai *Free Trade Zone* yang memberikan keringanan pajak seperti pembebasan pajak tertentu untuk menaikkan daya saing ekonomi daerah. Namun, meskipun demikian pelaku usaha UMKM masih sering merasakan dampak kebijakan pajak yang tidak sepenuhnya mendukung usahanya . Misalnya, meskipun dengan adanya pembebasan bea masuk pajak daerah atau pajak lainnya masih tetap menjadi beban yang signifikan bagi usaha kecil.

Selain itu juga, kepatuhan pajak di kalangan usaha UMKM sering kali menjadi isu karena keterbatasan pengetahuan tentang peraturan pajak dan akses terhadap sumber yang memadai dalam memenuhi kewajiban pajak. Kebijakan yang dibuat pemerintah yang terus berubah juga menjadi salah satu penyebab ketidakpastian dan kebingungan dikalangan UMKM yang mempengaruhi keputusan bisnis dan perilaku usaha pelaku

UMKM. Untuk mendorong perkembangan UMKM, pemerintah menerapkan kebijakan pajak yang lebih ringan bagi UMKM. Pemerintah memberikan kemudahan seperti tarif pajak yang lebih rendah dihitung berdasarkan omset. Secara keseluruhan, kebijakan pajak berdampak signifikan pada perkembangan UMKM. Pemerintah perlu merancang kebijakan pajak yang lebih fleksibel dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis. Kebijakan pajak yang dimaksud mencakup insentif pajak, pembebasan pajak, subsidi pajak, dan pengurangan pajak.

Akses finansial yang biasa disebut sebagai akses keuangan, menjadi faktor yang krusial bagi keberhasilan UMKM karena menyangkut pembiayaan atau modal dalam menjalankan usaha. Akses terhadap layanan keuangan yang memadai menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Di samping itu, akses terhadap pembiayaan menjadi masalah utama yang dihadapi oleh banyak pelaku UMKM, khususnya dalam memperoleh modal untuk ekspansi dan inovasi. Banyaknya UMKM yang kesulitan dalam mendapatkan modal awal yang cukup untuk memulai usaha, karena tidak banyak lembaga keuangan yang mau memberikan pinjaman bagi pelaku usaha. Hal disebabkan karena pelaku usaha tidak memiliki pembukuan yang rapi dan tidak memiliki jaminan pinjaman sesuai ketentuan lembaga keuangan yang membuat lembaga keuangan tersebut ragu untuk memberikan pinjaman modal. Sedangkan tanpa modal yang mencukupi, UMKM akan sulit untuk mengembangkan skala operasi dan membeli perlengkapan yang dibutuhkan. Meskipun

beberapa program pembiayaan dan pinjaman tersedia, tetapi masih banyak UMKM yang kesulitan mendapatkan akses modal.

Lembaga keuangan tradisional yang memandang UMKM sebagai investasi beresiko tinggi, hal ini yang membuat UMKM sulit mengembangkan bisnis, ataupun membeli bahan baku. Lembaga keuangan terutama bank, sering mensyaratkan dokumentasi yang lengkap seperti, laporan keuangan yang rapi, aset sebagai jaminan, dan riwayat kredit yang baik. Akibatnya dianggap beresiko tinggi, bank, dan lembaga keuangan sering kali memberikan bunga yang lebih tinggi kepada UMKM yang membebani pelaku usaha dengan biaya tambahan. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan menyebabkan UMKM sulit membuat perencanaan yang baik dan menjadi kurang siap untuk mengajukan pinjaman.

Untuk UMKM yang baru berdiri atau yang memiliki arus kas terbatas, pembayaran bunga yang tinggi menyebabkan kesulitan untuk berkembang, hal ini menjadi beban finansial yang berat bagi UMKM. Program pendanaan UMKM yang ada terkadang terbatas jumlahnya dan tidak merata distribusinya. Akibatnya, banyak UMKM tetap berada di skala kecil dan sulit mencapai profitabilitas yang stabil. Hal ini menghambat pelaku usaha dalam berinovasi dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan dukungan pemerintah, lembaga keuangan dan sektor swasta dalam menyediakan solusi finansial yang lebih inklusif dan aksesibel bagi UMKM.

Minat berwirausaha di kalangan penduduk Batam juga merupakan elemen penting yang mempengaruhi dinamika UMKM. Faktor seperti pendidikan, pengalaman bisnis, dan dukungan pemerintah berperan dalam memotivasi individu untuk memulai dan mengembangkan usahanya. Sekarang ini, minat berwirausaha sangat meningkat, meskipun begitu masih banyak calon pengusaha yang merasa ragu dalam memulai usahanya karena takut gagal atau kondisi ekonomi yang tidak pasti. Ketika minat berwirausaha tidak cukup kuat, hal ini berdampak pada ketahanan usaha dan kemampuan pelaku usaha untuk menghadapi tantangan dan resiko bisnis. Tanpa keterampilan yang memadai juga membuat pelaku usaha merasa kurang percaya diri.

Hal juga disebabkan oleh kurangnya akses terhadap program pelatihan yang membuat pelaku usaha tidak memiliki pengetahuan. Selain itu, persepsi negatif di masyarakat terhadap kegagalan usaha juga membuat pelaku usaha merasa tertekan dan khawatir jika usahanya tidak berhasil. Banyak orang yang sebenarnya punya potensi tapi tidak mampu mengenali peluang pasar atau tren pasar dan kebutuhan konsumen. Untuk mendorong minat usaha membutuhkan dukungan yang relevan untuk menginspirasi calon-calon pengusaha. Kota Batam, dengan posisi yang strategis, menawarkan banyak peluang bagi pengusaha terutama di sektor perdagangan dan jasa. Minat berwirausaha juga dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi, faktor sosial budaya dan program pemerintah.

Kebijakan pajak, akses finansial, dan minat berwirausaha saling berkaitan dan bersama-sama mempengaruhi perilaku usaha UMKM. Kebijakan yang tidak

mendukung dapat mengurangi minat berwirausaha dan membatasi akses ke pembiayaan yang akan menghambat pertumbuhan UMKM. Sebaliknya, kebijakan pajak yang mendukung UMKM dan akses finansial yang baik akan mendorong minat berwirausaha dan memperkuat daya saing UMKM. Oleh karena itu, dalam memahami ketiga faktor tersebut mempengaruhi perilaku usaha UMKM sangat penting untuk melakukan observasi dan penelitian langsung.

Penelitian tentang perilaku berwirausaha ini sudah dilakukan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, dan Cina. Di Indonesia, studi mengenai perilaku berwirausaha masih terbilang kurang diminati karena pengaruh faktor yang berbeda. Dalam hal ini teori perilaku terencana menjadi salah satu model yang luas dalam memperkirakan perilaku kewirausahaan. *Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang membahas tentang psikologi sosial seperti bagaimana sikap perilaku, norma yang subjektif dan kontrol perilaku yang mempengaruhi niat berperilaku. Hal ini mengacu pada persepsi atau cara pandang individu terhadap konsekuensi berperilaku sehingga pandangan seseorang terhadap kontrol perilaku bisa berubah ubah sesuai situasi dan kondisi.

Dalam beberapa tahun terakhir, peneliti telah mencoba memperluas konsep model *Theory of Planned Behavior* dengan melakukan pengujian terhadap variabel yang dianggap berdampak secara signifikan terhadap perilaku berwirausaha, seperti dukungan sosial, efikasi diri berwirausaha, pendidikan, komitmen, sikap, dan kebijakan kewirausahaan. Penelitian ini akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi

perilaku berusaha dan kaitannya dengan kebijakan perpajakan dan akses keuangan serta minat berwirausaha.

Penelitian ini mengimplikasikan *Theory of Planned Behavior* sebagai kerangka konseptual dengan berfokus pada kontrol perilaku untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung dari kebijakan pajak dan akses finansial terhadap perilaku kewirausahaan. Penelitian ini mengkaji keyakinan ada atau tidaknya variabel yang mendorong atau menghambat individu untuk menjadi wirausaha, khususnya yang terkait dengan kebijakan perpajakan dan akses finansial terhadap modal.

Penelitian ini didukung oleh (Priandhita Sukowidyanti Asmoro, Edlyin Khurotul Aini dan Ferina Nurlaily, 2020:57) dalam judul "*Tax Policy And Financial Acces :Implication for Entrepreneurial intenton and Entrepreneurial Behavior Among Generation Z* . Temuan menunjukkan bahwa kebijakan pajak dan akses finansial berpengaruh langsung terhadap perilaku wirausaha.

Selain penelitian di atas, terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Mustari, Fildza Anisya Ramadhani, Muhammad Hasan, Inanna, dan Tuti Supatminingsih, 2024:125) dalam judul *Understanding Generation Z's Entrepreneurial Intention and Behavior : Evidence From Indonesia*. Menyimpulkan bahwa sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dirasakan semuanya memiliki pengaruh positif terhadap niat atau minat berwirausaha.

Dari pemaparan latar belakang di atas dan dukungan dari penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti berencana akan melaksanakan pengujian menggunakan judul penelitian **“PENGARUH KEBIJAKAN PAJAK, AKSES FINANSIAL, DAN MINAT BERWIRAUSAHA TERHADAP PERILAKU USAHA UMKM DI KOTA BATAM”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, dalam penelitian ini peneliti akan mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan pelaku UMKM mengenai kebijakan pajak yang berlaku.
2. Kurangnya pengetahuan pelaku UMKM mengenai akses finansial dalam pembiayaan usaha.
3. Rendahnya tingkat pendidikan yang menghambat minat berwirausaha dalam memulai bisnis baru.
4. Kurangnya pemahaman pelaku UMKM dalam membuat pembukuan keuangan.

### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang akurat dan efisien. Oleh karena itu, peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Objek yang diteliti yaitu respondennya pada dinas UMKM di Kota Batam pada tahun 2023

2. Penelitian ini berfokus pada variabel perilaku usaha UMKM (Y) sebagai variabel terikat, dengan variabel bebas meliputi kebijakan pajak (X1), akses finansial (X2), dan minat berwirausaha (X3).

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Pertimbangan dalam menghadapi tantangan berdasarkan pada penjelasan latar belakang, penulis merinci permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kebijakan pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku usaha UMKM di Kota Batam.
2. Apakah akses finansial berpengaruh signifikan terhadap perilaku usaha UMKM di Kota Batam.
3. Apakah minat berwirausaha berpengaruh signifikan terhadap perilaku usaha UMKM di Kota Batam.
4. Apakah kebijakan pajak, akses finansial, dan minat berwirausaha secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perilaku UMKM di Kota Batam.

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan sebelumnya, tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku usaha UMKM di kota Batam
2. Untuk mengetahui akses finansial berpengaruh signifikan terhadap perilaku usaha UMKM di kota Batam

3. Untuk mengetahui minat berwirausaha berpengaruh signifikan terhadap perilaku usaha UMKM di kota Batam
4. Untuk mengetahui kebijakan pajak, akses finansial, dan minat berwirausaha secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap perilaku usaha UMKM di kota Batam

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dapat dihasilkan diantaranya :

### **1.6.1. Aspek Teoritis**

Penulis mengharapkan bahwa hasil temuan ini dapat memberikan sumbangan berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta menjadi acuan bagi :

1. Masyarakat

Memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara kebijakan pajak, akses finansial, dan minat berwirausaha terhadap perilaku usaha UMKM di kota Batam.

2. Peneliti

Menjadi pendukung bagi peneliti selanjutnya mengenai dengan kebijakan pajak, akses finansial, dan minat berwirausaha terhadap perilaku usaha UMKM di kota Batam.

### 3. Pemerintah dan perancangan kebijakan

Sebagai penambah wawasan dalam hal perancangan kebijakan yang mungkin akan diperlukan oleh pemerintah atau lembaga terkait dalam mengetahui perilaku usaha UMKM di kota Batam.

#### **1.6.2. Aspek Praktis**

Penulis berharap agar hasil penelitian ini bermanfaat bagi :

##### 1. Peneliti

Untuk memahami lebih dalam terkait kebijakan pajak, akses finansial, dan minat berwirausaha terhadap perilaku usaha UMKM di kota Batam serta melengkapi ilmu pengetahuan.

##### 2. Pelaku usaha UMKM yang sudah memiliki usaha dan yang akan memulai usaha

Menjadi salah satu bantuan informasi mengenai kebijakan pajak dan akses finansial terhadap masyarakat yang sudah memiliki usaha dan belum memulai usaha.

##### 3. Pemerintah

Untuk memperoleh informasi mengenai perilaku usaha UMKM dalam berwirausaha dan menjadi acuan untuk memberikan layanan pelatihan dan pendanaan terhadap pelaku usaha UMKM.